

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 44/ITJ/RC.610/IV/2026

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 24 April 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026, serta dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada pimpinan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal periode Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Secara umum, kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup optimal. **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id tercatat sebesar **107,88** dengan predikat “Baik”. Adapun indikator kinerja yang dapat diukur pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 (satu) indikator kinerja, yaitu *“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP”* dengan realisasi sebesar 92,78% dari target sebesar 86%, atau mencapai 107,88% dari target yang ditetapkan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp16.389.715.198,00 atau sebesar 16,87% dari pagu efektif sebesar Rp97.173.254.000,00, yang menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup sesuai dengan rencana.

Laporan ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, termasuk gambaran capaian kinerja, pengelolaan anggaran, potensi risiko, serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal ke depan.

Demikian kami sampaikan. Mohon arahan lebih lanjut, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Interim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Itjen KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan KKP pada Triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini ditujukan sebagai langkah pengendalian pencapaian target kinerja tahun 2026 yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pencapaian kinerja secara berkala (Triwulanan).

Laporan Kinerja Interim ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen Triwulan I Tahun 2026 guna memberikan informasi mengenai perkembangan pencapaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai. Informasi yang disajikan dalam laporan ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta proses pencapaian kinerja sehingga diharapkan seluruh target kinerja yang dimandatkan pada tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, target kinerja Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 107,88 (**kategori baik**). Adapun pengukuran kinerja dilakukan pada indikator kinerja “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP” dengan realisasi capaian sebesar 92,78% dari target sebesar 86%.

Pencapaian kinerja yang baik pada Triwulan I Tahun 2026 ini tentunya patut disyukuri. Namun demikian, pencapaian kinerja tersebut harus senantiasa tetap dijaga agar seluruh Indikator Kinerja Itjen dapat tercapai sesuai harapan dari target yang telah ditetapkan hingga berakhirnya tahun 2026. Sebagai upaya pencapaian kinerja, maka dibutuhkan dukungan komitmen, kerja sama dan sinergitas dari seluruh jajaran, baik dari internal maupun mitra kerja Itjen KKP.

Akhir kata ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Itjen KKP, sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Interim ini. Kami berharap saran dan kritik yang membangun untuk optimalisasi peran Itjen dalam mendukung kinerja KKP. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2026
Inspektur Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ade Tajudin Sutiawarman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen berupaya memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan terukur berdasarkan standar pengawasan yang berlaku. Selain itu, Itjen juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan melalui pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun pengalaman organisasi lain.

Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang tersedia, Itjen memfokuskan pelaksanaan pengawasan pada aspek-aspek yang signifikan dan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pengawasan intern berbasis risiko menjadi pendekatan terbaik untuk mengoptimalkan peran pengawasan di tengah keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang berisiko tinggi, serta menjadi perhatian publik maupun pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Itjen Tahun 2026 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Program (SP) dengan 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SP.1 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan target $\leq 0,5\%$
2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP dengan target 86,5%
3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dengan target 86%
4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP dengan target indeks 4,1

SP.2 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen

5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP dengan target nilai 3,61
6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP dengan target 82%
7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan target nilai 86,5

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, target kinerja Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 107,88 (**kategori “Baik”**). Rincian capaian kinerja Itjen yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2026 pada Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP sebesar 92,78% dari target sebesar 86%.

Dalam hal kinerja pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Itjen pada periode Triwulan I Tahun 2026 dapat dinilai cukup baik. Berdasarkan data pada aplikasi *My Integrated Treasury System* (MyIntress) dari Kementerian Keuangan, realisasi keuangan pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp16.389.715.198,00 (16,58%), dari pagu Rp98.878.693.000,00. Pagu tersebut merupakan pagu diluar blokir senilai Rp1.705.439.000,00 yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2026, sehingga pagu Itjen secara efektif tersisa Rp97.173.254.000,00. Jika mengacu pada pagu efektif tersebut, maka nilai realisasi anggaran Itjen sebesar 16,87%. Adapun target sebagaimana pada Halaman III DIPA periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp24.719.349.000,00 atau 25,00% dari pagu anggaran dan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran terdapat deviasi negatif sebesar Rp8.329.633.802,00.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa secara umum capaian kinerja Itjen pada periode Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai dengan optimal dan tidak ditemukan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dan anggaran. Namun demikian, dalam rangka pencapaian target kinerja selanjutnya, perlu dilakukan koordinasi internal dan pengendalian secara berkala guna memastikan proses pencapaian target kinerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas, Fungsi, dan Peran	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Metodologi	5
H. Sistematika Laporan	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rancangan Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025-2029	6
B. Kebijakan Pengawasan	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	12
C. Program dan Kegiatan Pengawasan	13
D. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengelolaan Kinerja	15
B. Capaian Kinerja	15
Sasaran Program ke-1	17
1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP ...	17
2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP	18
3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	18
4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	20
Sasaran Program ke-2	20
5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP	20
7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	22
C. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	22
D. Realisasi Anggaran	23
BAB 4 PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Kendala/Permasalahan	25
C. Rencana Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut	26
D. Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Atas Laporan Kinerja Itjen Triwulan IV Periode Tahun 2025	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2026	12
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 3. Capaian Kinerja Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 5. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP antar Periode Pengukuran.....	19
Tabel 6. Realisasi Anggaran Itjen Triwulan I Tahun 2026 (Jenis Belanja)* dnegn Pagu Blokir	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas, Fungsi, dan Peran Itjen	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP	4
Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP	8
Gambar 4. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP	12
Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026	16
Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM	21

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktik KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2025-2029, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Itjen KKP mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2026, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi, dan Peran Itjen

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Itjen

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Itjen.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PRL, Ditjen PK, dan Pusat Data dan Informasi.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PB dan BPPSDMKP.

5. Inspektorat IV

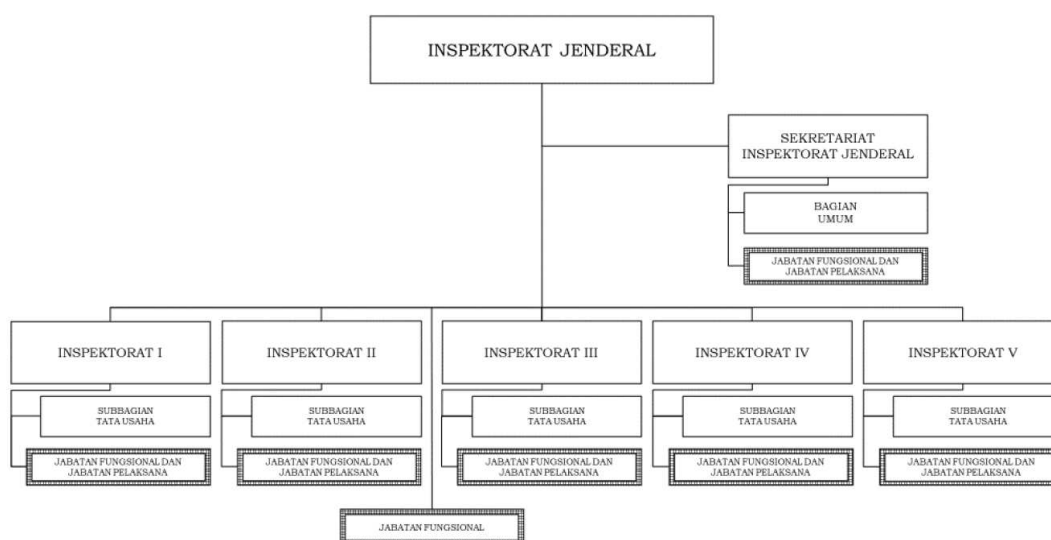
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Itjen, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Struktur organisasi Itjen KKP Tahun 2026 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran lingkup Itjen periode Triwulan I Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 untuk kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja mencakup pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dimandatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Inspektur Jenderal dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang diukur sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

G. METODOLOGI

Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan metode:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan.
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan.
 - c. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat berupa kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan serta permasalahan yang dihadapi atau perlu diatasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan.
 - d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
2. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas, Fungsi dan Peran, Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rancangan Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025-2029, Kebijakan Pengawasan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Program dan Kegiatan Pengawasan, Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Kinerja, Realisasi Rencana Aksi dan Realisasi Anggaran; dan 4) Penutup yang mencakup Kesimpulan, Permasalahan, Rencana Perbaikan, dan Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Laporan Kinerja periode sebelumnya.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025-2029

Pada prinsip penjenjangan kinerja, Rencana Strategis Kementerian merupakan dasar atau acuan bagi unit Eselon I dalam menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, Itjen selaku APIP mendukung Rencana Strategis KKP melalui program/kegiatan pengawasan intern. Pada periode Triwulan I Tahun 2026, perencanaan jangka menengah di level Kementerian dan unit Eselon I di bawahnya masih dalam proses penyusunan.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan penjenjangannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun kedepan serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan visi tersebut proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi:

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan”

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. *Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;*
- b. *Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;*
- c. *Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas nasional dan KKP antara lain: Revitalisasi Kawasan Tambak, Kampung Nelayan Modern, Dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Program yang Mendukung Kebijakan *Blue Economy*. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

1. *Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian KKP;*
2. *Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan KKP; dan*
3. *Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan KKP.*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektivitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Program.

4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Itjen mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Program “**Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP**” dan “**Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen**”.

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya dan diselaraskan pada level 2, yaitu Inspektorat I s.d V dan Sekretariat Itjen.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun untuk memberikan arah, fokus dan pilihan prioritas program dan kegiatan KKP yang akan diawasi pada tahun 2026. Dengan adanya kebijakan pengawasan ini, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan

pengawasan intern yang efektif dan efisien dalam mengawal program/kegiatan KKP, khususnya yang menjadi prioritas pimpinan Kementerian. Dalam prosesnya, Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun dengan dasar seperti disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP

Dasar kebijakan pengawasan secara umum meliputi hal-hal yang menjadi rujukan dasar bagi pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen di lingkungan KKP dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan kepada dasar kebijakan tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan KKP, Itjen KKP mengarahkan pelaksanaan pengawasan intern melalui beberapa hal, yaitu:

a. Peningkatan Peran *Quality Assurance*

Quality Assurance merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan/program di suatu organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan target tertentu yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan sumberdaya yang ada, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan.

b. Peningkatan Peran *Consulting Partner*

Consulting Partner merupakan kegiatan pengawasan di luar kegiatan pemberian jaminan kualitas untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi.

- c. Pengembangan Pengawasan Terpadu
Pengawasan Terpadu merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara bersamaan (terpadu) antara Itjen KKP dengan unit kerja/instansi lain.
- d. Penguatan Koordinasi Pengawasan
Koordinasi Pengawasan merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat koordinasi dalam hal pengawasan dengan instansi lain.

2. Dimensi Pengawasan Intern

Dari sisi dimensi pengawasan, Itjen KKP membagi kegiatan pengawasan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun lalu (*post*);
- b. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun berjalan (*on-going*);
- c. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun mendatang.

3. Jenis Pengawasan Intern

a. Area Pengawasan Program Prioritas

Kegiatan pengawasan pada area pengawasan program prioritas dilaksanakan dengan objek pengawasan berupa program/kegiatan prioritas KKP Tahun 2026. Pada tahun 2026 kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan prioritas yang menjadi prioritas Presiden, yaitu:

- 1) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
- 2) Pembangunan *Modelling* Ekstensifikasi dan Inteksifikasi Tambak Garam
- 3) Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS)
- 4) Revitalisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pengawasan pada area pengawasan program prioritas dilaksanakan dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dalam bentuk *advisory*
Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan penyusunan regulasi, asistensi manajemen risiko, asistensi pengadaan barang/jasa, dan bimbingan teknis yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP
- 2) Pengawasan dalam bentuk *quality control* dan *quality assurance*
Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan *probity audit* perencanaan dan pelaksanaan, audit kinerja, reuiu program,

pemantauan program secara berkala, pemantauan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan tata kelola perizinan.

3) Pengawasan dalam bentuk *post audit*

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan *probity audit* pemanfaatan, *monitoring* dan evaluasi program/kegiatan, penanganan pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Strategi Pengawasan Intern

Untuk memberikan nilai tambah atas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP, Itjen mengambil langkah terhadap strategi pengawasan yang berorientasi pada *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM). Strategi pengawasan diimplementasikan melalui:

a. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan intern dilaksanakan melalui sebuah pendekatan yang menekankan pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko sebagai dasar utama dalam menentukan prioritas, fokus, dan strategi pengawasan. Uraian dari pengawasan berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengawasan berbasis risiko mengalokasikan sumber daya pengawasan yang lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan merupakan sasaran utama organisasi;
- 2) Sumber daya pengawasan yang terbatas dapat diberdayakan secara lebih optimal karena pengawasan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang mengacu pada tingkat risiko. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Orientasi pengawasan berubah dari *post audit* di mana risiko telah terjadi menjadi pengawasan yang berorientasi pada aktivitas pengendalian (preventif) melalui peringatan dini atas kemungkinan terjadinya risiko yang akan dihadapi oleh manajemen di masa yang akan datang.
- 4) Pengawasan menekankan pentingnya evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

b. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi (TI) bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan strategis, termasuk dalam fungsi

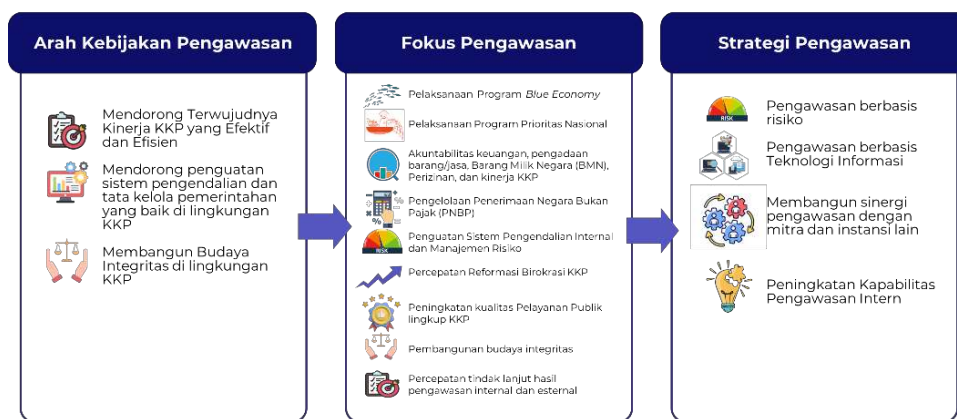
pengawasan intern. Pengawasan intern memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, pengawasan intern diharapkan dapat lebih adaptif, responsif, dan bernilai tambah. Lebih lanjut, dengan dukungan TI yang tepat, fungsi pengawasan diharapkan dapat menjadi lebih proaktif, terukur, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan tata kelola organisasi.

c. Membangun Sinergi Pengawasan

Sinergi antara APIP dan Auditi (mitra) sangat penting dalam menciptakan pengawasan intern yang efektif, membangun tata kelola yang baik, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Selain itu, sinergi pengawasan juga perlu dibangun dengan instansi lain (eksternal). Dalam hal ini, sinergi pengawasan dapat dilakukan dengan APIP lain, aparat penegak hukum (APH), dan organisasi lain yang dapat mendukung kinerja pengawasan intern. Sinergi pengawasan dapat dilakukan dalam rangka pengawalan dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pengawasan intern. Melalui sinergi semacam ini, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan melalui perluasan ruang lingkup pengawasan karena adanya dukungan dari aparat pengawasan lainnya. Selain itu, sinergi pengawasan juga dapat dibangun untuk mendorong peningkatan kompetensi APIP melalui pertukaran informasi maupun ilmu pengetahuan (*sharing knowledge*).

d. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pengawasan intern yang berkualitas dapat menentukan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang dijalankan oleh organisasi. Karenanya, kapabilitas pengawasan intern menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan program/kegiatan yang efektif dan efisien. Mengacu pada pedoman teknis peningkatan mandiri kapabilitas APIP, Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.



Gambar 4. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2026, Itjen KKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama yaitu Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran (pagu awal) sebesar Rp98.878.693.000,00 (pagu diluar blokir sebesar Rp1.705.439.000,00).

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 (Lampiran 1) yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,50
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86,00
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,10
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,61
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	82,00
	7	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (%)	86,50

Penetapan kinerja Itjen KKP Tahun 2026 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan disajikan pada Lampiran 1.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan KKP, Itjen telah menyusun detail rencana pengawasan khususnya atas Program Prioritas KKP Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita dan Ekonomi Biru dalam bentuk PKPT Tahun 2026. Program kerja tersebut merupakan implementasi atas peran *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* yang memberikan keyakinan memadai bagi pimpinan organisasi KKP pada pelaksanaan program dan kegiatan KKP yang tercantum dalam DIPA KKP Tahun 2026.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan program “Dukungan Manajemen”.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lebih rinci ke dalam kegiatan - kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Reviu RKA-K/L Mitra Itjen KKP;
5. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
6. Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
7. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko;
8. Pemantauan Tindak Lanjut;
9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
10. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
11. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
12. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
13. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
14. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
15. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
16. Pendampingan Program Pembangunan KP;
17. Pemantauan Program Strategis Bidang KP;
18. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP;
19. Pengawasan kegiatan prioritas yang bersumber pada PHLN;

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk

memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 2.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja yang secara rinci tergambar pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum ada penilaian	

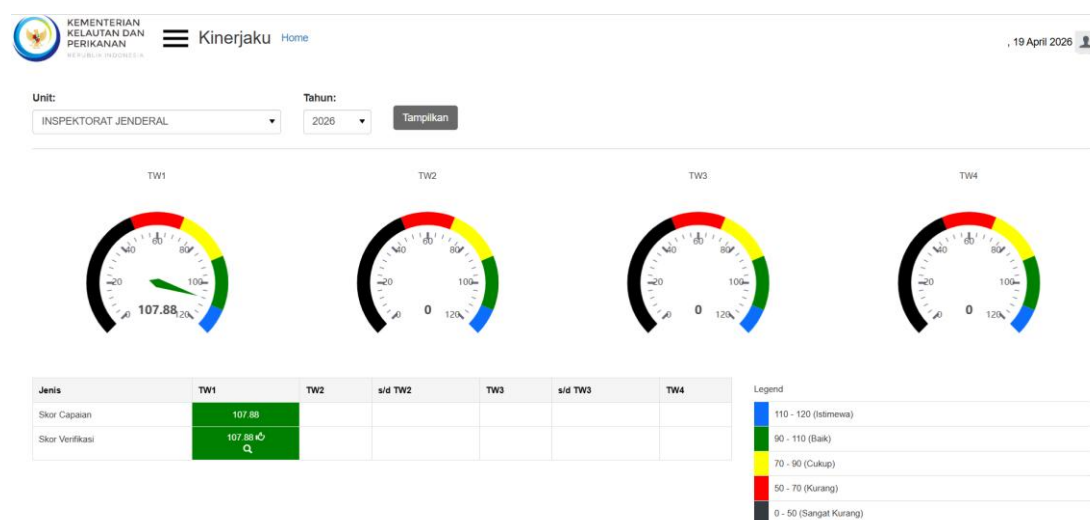
Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada Tabel 2 di atas, diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik, capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan minimal harus mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui *monitoring* dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antararget dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui

pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran program/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi capaian kinerja Itjen Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan pada gambar di atas diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen Tahun 2026 sebesar **107,88 (predikat “Baik”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang telah dilakukan oleh Itjen Triwulan I Tahun 2026 telah optimal. Capaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	86	92,78	107,88	107,88

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai dengan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja program Itjen Triwulan I Tahun 2026 disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Program ke-1

Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP

Sasaran program ini ditetapkan sebagai tolok ukur manfaat (*outcome*) yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Itjen menjadikan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP sebagai Sasaran Program pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Itjen dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan KKP diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 4 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

Indikator Kinerja (IK.01), yaitu Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2026. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan pada Triwulan III Tahun 2026, sehingga IK.01 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP

Indikator Kinerja (IK.02), yaitu Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB KKP yang telah ditetapkan. Pengukuran Indikator Kinerja ini dinilai berdasarkan perbandingan antara Rencana Aksi RB KKP Tahun 2026 yang terlaksana dengan Rencana Aksi RB KKP Tahun 2026. Indikator Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan indikator yang baru ditetapkan di tahun 2025. Itjen menetapkan target Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP sebesar 86,5% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga IK.02 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Indikator Kinerja (IK.03), yaitu Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan periode pengukuran oleh unit eselon I lingkup KKP dengan target tahun 2026 sebesar 86%. Pada periode Triwulan I Tahun 2026 capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026) secara tuntas oleh unit eselon I.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/RC.410/IV/2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” periode Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP sebesar 92,78% (tuntas 604 dari 651 rekomendasi) atau dengan sebesar 107,88% dari target 86%. Secara rinci, realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom	Sisa Rekom (%)
1	Setjen	39	39	100	0	0,00
2	Ditjen PK	103	88	85,44	15	14,56
3	Ditjen PRL	2	2	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00	21	25,00
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46	3	2,54
7	BPPSDMKP	49	49	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29	3	10,71
9	BPPMHKP	150	145	96,67	5	3,33
10	Itjen	5	5	100	0	0,00
TOTAL		651	604	92,78	47	7,22

Capaian IK.03 jika dibandingkn dengan capaian periode Triwulan I tahun 2025 dan dengan target akhir tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP antar Periode Pengukuran

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2026			Triwulan I Tahun 2025			Terhadap Target Tahun 2026	
	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86	92,78	107,88	85	92,39	108,69	86	107,88

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen pada periode Triwulan I Tahun 2026, lebih baik dari periode Triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, namun jika dilihat dari nilai capaiannya mengalami penurunan. Terkait hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi tindak lanjut hasil pengawasan bersifat fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah dan jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, tingkat kesulitan tindak lanjut rekomendasi, dan komitmen unit kerja dalam melaksanakan tindak lanjut. Selain hal tersebut, terjadinya penurunan capaian di tahun 2026 disebabkan kenaikan target indikator kinerja yang ditetapkan, di tahun 2026 yaitu sebesar 86% dari Tahun 2026 sebesar 85%, serta capaian tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa capaian periode Triwulan I Tahun 2026 telah melampaui target yang diharapkan untuk menuju capaian target akhir tahun.

Capaian positif pada Triwulan I Tahun 2026, didukung oleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Itjen dan optimalisasi proses input data, verifikasi, penetapan status dengan penggunaan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP

Indikator Kinerja (IK.04), yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP adalah suatu penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP atas kepuasan terhadap kinerja pengawasan intern oleh Itjen KKP. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diperoleh berdasarkan hasil survei dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Pada tahun 2026, target Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP berada pada angka 4,10 (skala likert 1-5) yang diukur secara semesteran, sehingga IK.04 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Sasaran Program ke-2

Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Itjen

Indikator Kinerja (IK.05), yaitu Tata kelola yang baik menjadi hal fundamental bagi terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Karenanya, sasaran program ke-2 ini ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran program ke-1 “Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP”. Keberhasilan tercapainya Sasaran Program ke-2 diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

5. Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP merupakan gambaran atas tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Itjen yang diukur dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)* untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.
2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian eksternal.
3. Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen diukur berdasarkan hasil evaluasi BPKP dengan menggunakan kerangka kerja (*framework*) *Internal Audit Capability Model* (IACM), yaitu *framework* yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif. Dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian kapabilitas Itjen KKP, maka dilakukan penilaian mandiri oleh tim internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat V selaku pengawas internal Itjen KKP dengan mengacu pada

pedoman evaluasi kapabilitas APIP (IACM). Target Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP Tahun 2026 ditetapkan pada nilai 2,4 di mana pengukurannya dilakukan secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga IK.05 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Indikator Kinerja (IK.06) yaitu Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut adalah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan pada Aplikasi SIMWAS yang diukur secara semesteran dengan target yang sama yaitu sebesar 82%, sehingga IK.06 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

7. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen KKP merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi general (tata kelola) pada Inspektorat Jenderal. Nilai Implementasi RB unit eselon I diperoleh berdasarkan hasil perhitungan atas capaian Indikator Kinerja Manajerial sebagai indikator pembentuk RB yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini perhitungan Nilai Implementasi RB unit eselon I dilakukan dengan menggunakan formula/kertas kerja pengukuran yang disusun oleh Sekretariat Jenderal. Itjen menetapkan target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dengan nilai sebesar 86 yang diukur secara Tahunan, sehingga IK.07 ini tidak dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I Tahun 2026.

C. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian target IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung capaian IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi rencana aksi

atas pencapaian indikator kinerja Itjen KKP Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan pemantauan, rencana aksi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 53 kegiatan dari target 53 kegiatan atau terlaksana seluruhnya (100%). Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, seluruh kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan menyesuaikan metode pelaksanaan pengawasan diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi/daring. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kendala pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dapat teratasi melalui penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, tentunya terdapat hal yang perlu menjadi catatan, yaitu pelaksanaan pengawasan secara daring masih memiliki berbagai keterbatasan terkait validitas kondisi bila dibandingkan dengan pengawasan yang dilaksanakan langsung di lapangan (*on the spot*) .

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data pada aplikasi *My Integrated Treasury System* (MyIntress) Kementerian Keuangan, realisasi anggaran Itjen periode Triwulan I Tahun 2026 atau sampai dengan 31 Maret 2026 dapat dinilai cukup baik yaitu sebesar Rp16.389.715.198,00 dari pagu anggaran sebesar Rp98.878.693.000,00. Pagu tersebut merupakan pagu tidak termasuk blokir anggaran senilai Rp1.705.439.000,00 yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2026, sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp97.173.254.000,00. Sehingga realisasi anggaran jika dibandingkan dengan pagu sebesar 16,58% atau sebesar 16,87% jika mengacu pada pagu efektif.

Adapun target Rencana Penarikan Dana (RPD) periode Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana pada Halaman III DIPA, yaitu sebesar Rp24.719.349.000,00 atau 25,44% dari pagu efektif dan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran periode Triwulan I Tahun 2026, yaitu sebesar Rp16.389.715.198,00 maka mengalami deviasi negatif sebesar Rp8.329.633.802,00. Rincian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 per jenis belanja disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Itjen Triwulan I Tahun 2026 (Jenis Belanja)* dnegn Pagu Blokir

No.	Nama Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir** (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	40.156.560.000	9.464.916.146	23,57	0	30.691.643.854
2	Belanja Barang	54.690.010.000	6.440.912.674	11,78	250,316.000	47.998.781.326
3	Belanja Modal	4.032.123.000	483.886.378	12,00	1,455,123.000	2.093.113.622
Jumlah		97.173.254.000	33.574.365.925	16,58	1.705.439.000	80.783.538.802

Keterangan:

* Sumber Aplikasi SAKTI

** Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2026

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen KKP periode Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar **107,88 (berpredikat “Baik”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang dilakukan Itjen pada Triwulan I Tahun 2026 telah optimal.
2. Indikator kinerja yang dapat diukur pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP” sebesar 92,78% dari target sebesar 86% atau 107,88% dari target.
3. Realisasi anggaran Itjen Triwulan I Tahun 2026 masih belum optimal jika dibandingkan dengan RPD yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran sebesar Rp16.389.715.198,00 (16,58%) dari pagu anggaran sebesar Rp98.878.693.000,00, pagu anggaran tersebut diluar blokir anggaran senilai Rp1.705.439.000,00, sehingga pagu efektif menjadi sebesar Rp97.173.254.000,00 dan jika dibandingkan dengan pagu efektif, realisasi anggaran menjadi sebesar 16,87%.
 - b. Jika dibandingkan dengan target penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2026 yang ditetapkan pada Halaman III DIPA sebesar Rp24.719.349.000,00 atau 25% dari pagu anggaran atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp8.329.633.802,00.

B. KENDALA/PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026, tidak ditemukan kendala/masalah yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Itjen karena secara umum capaian kinerja Itjen telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan kegiatan prioritas dan dukungan anggaran pengawasan, maka diperlukan penyesuaian anggaran, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat optimal.

C. RENCANA PERBAIKAN/RENCANA TINDAK LANJUT

Terkait dengan catatan hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana di sebutkan di atas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal untuk menjaga capaian kinerja antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan prioritas, khususnya pengawasan kegiatan prioritas KNMP;
2. Melakukan penyesuaian anggaran pengawasan dan dukungan pengawasan.

D. TINDAK LANJUT RENCANA PERBAIKAN ATAS LAPORAN KINERJA ITJEN TRIWULAN IV PERIODE TAHUN 2025

Dalam rangka menjaga kualitas capaian kinerja Itjen Tahun 2026, telah dilakukan upaya pemantauan atas langkah perbaikan (rekomendasi) pada Laporan Kinerja Itjen KKP Tahun 2025, yaitu:

1. Telah dilakukan reviu pedoman/petunjuk teknis dan tata laksana pengawasan intern sebagai dasar untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan manajemen pengawasan intern lingkup KKP.
2. Telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Itjen Tahun 2026 dengan fokus pada pengawalan program prioritas nasional dan KKP berdasarkan arah kebijakan pimpinan;
3. Telah dilakukan koordinasi dengan BPKP dalam hal peningkatan kapabilitas pengawasan intern Itjen KKP dengan kerangka IACM.

Dokumen tindak lanjut ini disajikan pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1bwTznDWet5lAnvjm2A5VhGj94H6Zfik5?usp=sharing>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Tajudin Sutiawarman**

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,5
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86
		4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,1
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen (nilai)	3,61
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen (%)	82
		7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal (nilai)	86,5

Lampiran 2. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Periode Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Unit PJ	Kegiatan Pendukung		Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Kegiatan s.d. TW I			Permasalahan	Rencana TL
										T	R	%		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							98.878.693.000							
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	Inspektorat V	1	Layanan Audit Internal (Pengawasan Akuntabilitas Keuangan)	4.785.500.000	120	Kegiatan	30	33	110,00%		
					2	Layanan Audit Internal (Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra)	30.542.897.000	120	Kegiatan	30	35	116,67%		
					3	Layanan Audit Internal (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP)	1.789.565.000	4	Kegiatan	1	1	100,00%		
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup KKP (%)	86,5	Inspektorat IV	1	Layanan Audit Internal (Pengawasan Manajerial Non Keuangan lingkup KKP)	2.204.292.000	120	Kegiatan	30	30	100,00%		
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	86	Inspektorat I,II,III,IV,V	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	653.797.000	12	Kegiatan	3	3	100,00%		
	4	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,1	Sekretariat Itjen	1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	4	Kegiatan	1	1	100,00%		
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Itjen	5	Nilai Kapabilitas Pengawasan Itjen KKP (Nilai)	3,61	Sekretariat Itjen	1	Perencanaan dan Penganggaran	452.326.000	4	Dokumen	1	1	100,00%		
					2	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	120.200.000	4	Kegiatan	1	1	100,00%		
					3	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.325.000.000	50	Unit	26	26	100,00%		
					4	Layanan BMN	120.1							

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Unit PJ	Kegiatan Pendukung		Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Kegiatan s.d. TW I			Permasalahan	Rencana TL
										T	R	%		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	82	Sekretariat Itjen	1	Layanan Data dan Informasi	471.840.000	2	Kegiatan	0	-	-		
	7	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Nilai)	86,5	Inspektorat V	1	Layanan Reformasi Kinerja	197.400.000	2	Kegiatan	0	-	-		
					2	Layanan Hukum	197.482.000	4	Kegiatan	1	1	100,00%		
					3	Layanan Manajemen Keuangan	508.000.000	12	Layanan	3	3	100,00%		
					4	Layanan Manajemen SDM	458.326.000	12	Layanan	3	3	100,00%		
					5	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4.088.495.000	231	Orang	1	1	100,00%		

